

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Pulau Sumatera

Azzah Oktapania ^{1*}, Zulkifli ², Siska Aprianti ³

^{1*,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Email: azzah.paniaaa04@gmail.com ^{1*}, zulkifliwancik@gmail.com ², siskaapriati@polsri.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 10 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 November 2025; Diterima 10 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Oktapania, A., Zulkifli, Z., & Aprianti, S. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Pulau Sumatera. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 102-110. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.4878>.

Abstrak

Studi ini dimaksud untuk mengkaji pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019 hingga 2023 dengan website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menjadi sumber utama pengambilan data sekunder dalam penelitian ini. dan metode regresi berganda dengan EvIEWS 13. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, variabel derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja pada Provinsi di Pulau Sumatera. Sebaliknya, variabel efektivitas PAD dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil pengujian secara simultan mengindikasikan bahwa keempat variabel berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas PAD dan tingkat pembiayaan SiLPA tidak selalu berujung pada peningkatan alokasi belanja modal apabila pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tidak dapat mengelola anggaran APBD dengan baik.

Kata Kunci: Belanja Modal; Derajat Desentralisasi Fiskal; Ketergantungan Keuangan Daerah; Efektivitas PAD; Tingkat Pembiayaan SiLPA.

Abstract

This study is intended to examine the effect of the Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Dependence, PAD Effectiveness, and SiLPA Financing Level on Capital Expenditure Allocation in Provinces on the Island of Sumatra during the period 2019 to 2023 with the official website of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia which is the main source of secondary data collection in this study. and multiple regression methods with EvIEWS 13. Based on the results of partial analysis, the variables of the degree of fiscal decentralization and regional financial dependence have a significant positive effect on the allocation of expenditure in the Province on the Island of Sumatra. In contrast, the variable effectiveness of PAD and the level of SiLPA financing on the allocation of capital expenditure in the Province on the Island of Sumatra. Simultaneous test results indicate that the four variables affect the allocation of capital expenditure. This finding indicates that an increase in the effectiveness of PAD and the level of SiLPA financing does not always lead to an increase in the allocation of capital expenditure if the provincial government on the island of Sumatra cannot manage the APBD budget properly.

Keyword: Capital Expenditure; Fiscal Decentralization; Financial Dependency; PAD Effectiveness; SiLPA.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri (Darmanto, 2015; Riant, 2022). Belanja modal, yang merupakan pengeluaran untuk membeli aset tetap guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah, adalah salah satu bentuk belanja yang sangat krusial bagi pemerintah daerah. Namun, realisasi belanja modal pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019 hingga 2023 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan proporsi ideal 30-40% dari total APBD (Fachrul, 2023). Pemerintah provinsi di Pulau Sumatera cenderung mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang kurang produktif dibandingkan dengan penggunaan untuk belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut masih menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai agen diharapkan dapat bertindak dalam kepentingan masyarakat (principal) melalui pengalokasian anggaran secara efisien (Suhardi, 2018). Ketidakefisienan dalam alokasi belanja modal sering kali menjadi indikasi dari lemahnya kontrol atau rendahnya kapasitas fiskal daerah (Sutrisno & Kurniawan, 2020). Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal, seperti derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan tingkat pembiayaan SiLPA (Edison *et al.*, 2022; Hidayat *et al.*, 2024). Akan tetapi, sebagian besar penelitian lebih terfokus pada tingkat kabupaten/kota daripada tingkat provinsi, padahal tingkat provinsi memiliki karakteristik fiskal yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal secara parsial maupun simultan pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun anggaran 2019–2023. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam perancangan kebijakan fiskal yang lebih berkualitas, yang berfokus pada keberlanjutan pembangunan (Hady & Cahaya, 2019).

2. Tinjauan Pustaka

Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor fiskal yang mencerminkan kinerja keuangan daerah. Salah satu faktor yang paling mendasar adalah derajat desentralisasi fiskal, yang memberikan otonomi lebih besar bagi daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Menurut Suhardi (2018), desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran, termasuk belanja modal. Penelitian oleh Edison *et al.* (2022) juga menemukan bahwa tingkat desentralisasi yang lebih tinggi cenderung mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pengeluaran yang mendukung pembangunan, termasuk belanja modal. Selain desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat juga memainkan peran penting dalam pengalokasian belanja modal. Penelitian oleh Hady dan Cahaya (2019) menyatakan bahwa daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), sering kali menghadapi kendala dalam merancang belanja modal yang optimal. Meskipun demikian, ketergantungan ini bisa menjadi peluang jika dikelola dengan baik, dengan dana transfer yang tepat sasaran dapat mendukung peningkatan belanja modal daerah. Dalam hal ini, efektivitas PAD menjadi faktor penting yang menunjukkan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan sumber daya internalnya untuk mendanai belanja modal.

RESEARCH ARTICLE

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa efektivitas PAD tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan alokasi belanja modal. Darmanto (2015) berpendapat bahwa meskipun PAD dapat meningkatkan kemandirian fiskal, realisasi PAD sering kali lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan belanja barang dan jasa, yang kurang mendukung pengembangan infrastruktur fisik. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa meskipun PAD dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, penggunaan PAD yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan alokasi belanja modal yang terbatas. Tingkat pembiayaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga turut memengaruhi belanja modal daerah. Menurut penelitian oleh Sutrisno dan Kurniawan (2020), meskipun SiLPA dapat menjadi sumber tambahan bagi belanja daerah, penggunaannya yang sering kali diprioritaskan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai belanja rutin menjadikannya kurang optimal untuk belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang buruk dapat membatasi efektivitas SiLPA dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, penelitian oleh Fachrul (2023) menunjukkan bahwa kendala dalam penggunaan SiLPA dapat mengurangi potensi peningkatan belanja modal meskipun dana tersebut tersedia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi alokasi belanja modal pada pemerintah daerah, tantangan terbesar terletak pada pengelolaan anggaran yang efisien dan perencanaan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis lebih mendalam mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal di provinsi-provinsi Pulau Sumatera, dengan harapan dapat memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019 hingga 2023. Sumber data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, yaitu alokasi belanja modal, serta empat variabel independen, yaitu derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tingkat pembiayaan dari SiLPA. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model regresi panel. Pemilihan model panel yang paling sesuai dilakukan melalui beberapa uji, antara lain Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Selain itu, dilakukan juga uji terhadap asumsi klasik untuk memastikan keandalan model regresi yang digunakan. Selanjutnya, pengujian terhadap koefisien regresi dilakukan dengan Uji R², Uji F, dan Uji t, untuk mengukur pengaruh variabel independen baik secara simultan maupun parsial terhadap alokasi belanja modal.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dengan menyajikan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel yang dianalisis. Analisis ini memberikan gambaran umum mengenai distribusi data, yang penting untuk memahami pola dasar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ringkasan hasil dari statistik deskriptif untuk masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut:

RESEARCH ARTICLE

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.175288	0.390270	0.598432	0.996058	0.089436
Median	0.179450	0.387800	0.610200	0.994900	0.059200
Maximum	0.264700	0.588600	0.828700	1.338800	0.493000
Minimum	0.086300	0.171300	0.358600	0.637800	0.005900
Std. Dev.	0.042482	0.099338	0.111326	0.141404	0.099898
Skewness	0.023222	-0.173658	-0.059887	-0.183129	2.408030
Kurtosis	2.469419	2.947645	2.838427	3.308173	8.940558
Jarque-Bera	0.590985	0.257021	0.084274	0.477324	121.8430
Probability	0.744165	0.879404	0.958738	0.787681	0.000000
Sum	8.764400	19.51350	29.92160	49.80290	4.471800
Sum Sq. Dev.	0.088430	0.483538	0.607278	0.979755	0.489000
Observations	50	50	50	50	50

Statistik deskriptif yang disajikan dalam Tabel 1 menggambarkan distribusi data untuk masing-masing variabel yang dianalisis. Variabel Belanja Modal (Y), yang diukur melalui rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, memiliki nilai berkisar antara 0,0863 hingga 0,2647. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 0,1753, dengan standar deviasi sebesar 0,0425. Derajat Desentralisasi Fiskal (X1), yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, menunjukkan rentang nilai antara 0,1713 hingga 0,5886. Nilai rata-rata untuk variabel ini adalah 0,3903, dengan standar deviasi 0,0993. Ketergantungan Keuangan Daerah (X2), yang dihitung berdasarkan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah, memiliki nilai minimum sebesar 0,3586 dan maksimum 0,8287, dengan nilai rata-rata 0,5984 dan standar deviasi 0,1113. Efektivitas PAD (X3), yang diukur dengan perbandingan antara realisasi PAD dan anggaran PAD, memiliki rentang nilai antara 0,6378 hingga 1,3388, dengan rata-rata 0,9961 dan standar deviasi 0,1414. Tingkat Pembiayaan SiLPA (X4) yang dihitung melalui rasio SiLPA terhadap total belanja daerah, menunjukkan rentang nilai antara 0,0059 hingga 0,4930, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0894 dan standar deviasi 0,0999.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.526636	(9,36)	0.0032
Cross-section Chi-square	31.607693	9	0.0002

Nilai probabilitas pada uji cross-section chi-square yang tercantum dalam Tabel 2 adalah sebesar 0,0002, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,0002 < 0,05$). Dengan demikian, model regresi yang paling sesuai untuk analisis ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

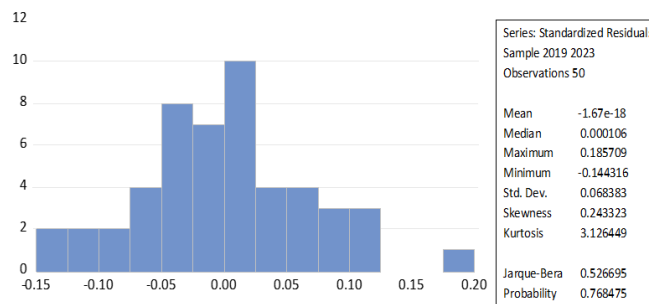
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.698829	4	0.0001

Nilai probabilitas pada Tabel 3 adalah sebesar 0,0001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0001 < 0,05$). Oleh karena itu, model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil dari kedua pengujian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) terpilih, dapat disimpulkan bahwa pendekatan model yang optimal untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera adalah menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

RESEARCH ARTICLE

Tabel 4. Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.178518	0.072149	-2.474293	0.0182
X1	0.668737	0.133729	5.000688	0.0000
X2	1.176256	0.257012	4.576662	0.0001
X3	0.013045	0.026341	0.495244	0.6234
X4	-0.078789	0.125267	-0.628971	0.5333



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,768475, yang lebih besar dari 0,05 ($0,768475 > 0,05$). Dengan demikian, data dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.020864	534.9044	NA
X1	0.025407	105.5071	6.298599
X2	0.020274	192.4573	6.312732
X3	0.000148	5.326062	1.007844
X4	0.002118	2.293094	1.006188

Merujuk pada Tabel di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel independen adalah kurang dari 10,00. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.560749	Prob. F(4,45)	0.6923
Obs*R-squared	2.373893	Prob. Chi-Square(4)	0.6674
Scaled explained SS	2.030494	Prob. Chi-Square(4)	0.7302

Merujuk pada tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Probabilitas ($0,6674 > 0,05$). Sehingga dapat diasumsikan bahwa model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.756228	Prob. F(2,42)	0.0750
Obs*R-squared	5.685043	Prob. Chi-Square(2)	0.0583

RESEARCH ARTICLE

Tabel 7 menunjukkan probabilitas uji autokorelasi ($0,0583 > 0,05$). Yang artinya model regresi tidak mengindikasikan adanya permasalahan autokorelasi.

$$Y = -0.178518 + 0.668737 \cdot X_1 + 1.176256 \cdot X_2 + 0.013045 \cdot X_3 - 0.078789 \cdot X_4$$

Nilai konstanta dalam model regresi sebesar -0,178518 mengindikasikan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, belanja modal akan berada pada tingkat -17,85%. Derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, dengan koefisien sebesar 0,668737, yang berarti setiap peningkatan 1% dalam derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan belanja modal sebesar 66,87%, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Ketergantungan keuangan daerah juga menunjukkan pengaruh positif yang lebih besar, yaitu 117,63% untuk setiap kenaikan 1%. Sementara itu, efektivitas PAD meskipun memiliki koefisien positif sebesar 0,013045, justru cenderung menurunkan belanja modal sebesar 1,30%. Adapun tingkat pembiayaan SiLPA menunjukkan pengaruh negatif dengan koefisien -0,078789, yang berarti setiap peningkatan 1% pada variabel ini akan menurunkan belanja modal sebesar 7,88%.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.715517	Mean dependent var	0.221954
Adjusted R-squared	0.612787	S.D. dependent var	0.128209
S.E. of regression	0.079780	Akaike info criterion	-1.987590
Sum squared resid	0.229135	Schwarz criterion	-1.452223
Log likelihood	63.68974	Hannan-Quinn criter.	-1.783719
F-statistic	6.965014	Durbin-Watson stat	1.860595
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,612787. Dengan demikian, sekitar 61,27% perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara 38,73% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

4.1.2 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 8, nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000002, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,000002 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, variabel-variabel independen, yaitu derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan tingkat pembiayaan SiLPA, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

4.1.3 Uji Parsial (Uji T)

Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (X_1) dengan nilai thitung sebesar 5,000688 lebih besar dari ttabel (11,67943) dan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada provinsi di Pulau Sumatera. Selain itu, variabel Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2) juga berpengaruh signifikan, dengan thitung sebesar 4,576662 yang lebih besar dari ttabel dan nilai probabilitas 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, variabel Efektivitas PAD (X_3) memiliki thitung sebesar 0,495244, yang lebih kecil dari ttabel, dan nilai probabilitas 0,6234, yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Demikian pula, variabel Tingkat Pembiayaan SiLPA (X_4) menunjukkan thitung sebesar 0,628971, yang lebih kecil dari ttabel, dengan nilai probabilitas 0,5333, yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan.

4.2 Pembahasan

Temuan studi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan nilai Thitung yang lebih besar dari Ttabel serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal, semakin besar pula alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi lebih mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Dalam konteks teori agensi, pemerintah daerah sebagai agen diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif demi kepentingan masyarakat sebagai principal. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal (Edison *et al.*, 2022; Hady & Cahaya, 2019; Mulyani & Fitra, 2023). Selanjutnya, ketergantungan keuangan daerah (X2) juga terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini didukung oleh nilai Thitung yang lebih besar dari Ttabel dan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, semakin tinggi pula realisasi belanja modal. Dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), berperan penting dalam mendukung pembangunan di daerah, meskipun ketergantungan tersebut mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal. Namun, jika dana tersebut dikelola dengan baik, ia tetap dapat mendukung pembiayaan belanja modal, sesuai dengan teori agensi yang menekankan penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Devi *et al.* (2022), Hady & Cahaya (2019), dan Nazila *et al.* (2021).

Di sisi lain, efektivitas PAD (X3) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uji t, nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel dan tingkat signifikansi melebihi 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hal ini dapat dijelaskan karena efektivitas PAD lebih mencerminkan pencapaian terhadap target pendapatan, bukan besaran aktual PAD yang diterima. PAD yang berhasil direalisasikan umumnya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada belanja modal. Meskipun efektivitas PAD tergolong tinggi, ia tidak cukup mendorong peningkatan belanja modal, kecuali ada perbaikan dalam tata kelola dan komitmen pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Auliya & Hidajat (2024), Darmastuti *et al.* (2022), dan Hidayat *et al.* (2024). Terakhir, tingkat pembiayaan SiLPA (X4) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil uji t menunjukkan nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ini juga ditolak. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dana SiLPA umumnya digunakan untuk menutup defisit anggaran, membiayai belanja wajib, atau dialokasikan untuk belanja operasional, bukan untuk belanja modal. Selain itu, perencanaan belanja modal dilakukan sebelum mengetahui besaran SiLPA, sehingga terbatasnya ruang fiskal menghambat penggunaannya untuk pembangunan fisik. Kapasitas penyerapan anggaran yang rendah di beberapa daerah juga menjadi faktor penghambat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menggunakan anggaran untuk belanja yang produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Lubis & Ritonga (2021), Pinem *et al.* (2020), dan Sartika *et al.* (2017).

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (X1) dan Ketergantungan Keuangan Daerah (X2) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan keuangan daerah, semakin besar kemungkinan adanya peningkatan alokasi belanja modal. Sebaliknya, Efektivitas PAD (X3) dan Tingkat Pembiayaan SiLPA (X4) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang mengindikasikan bahwa meskipun kedua variabel ini berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas dan pemanfaatan dana SiLPA belum dapat secara langsung meningkatkan belanja modal.

RESEARCH ARTICLE

Namun demikian, hasil uji simultan menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, dengan nilai probabilitas yang sangat kecil ($0,000002 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada variabel yang tidak berpengaruh signifikan secara parsial, kombinasi dari variabel-variabel tersebut tetap memengaruhi pengalokasian belanja modal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel moderasi yang berpotensi memengaruhi alokasi belanja modal, seperti faktor politik, tingkat pemerintahan, atau peraturan daerah yang lebih spesifik. Selain itu, karena penelitian ini hanya mencakup provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, studi selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, termasuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi lain, atau bahkan pulau lainnya. Hal ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal, dan untuk melihat apakah pola-pola yang ditemukan di Pulau Sumatera juga berlaku di wilayah lain di Indonesia.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak atas dukungan dan bantuannya selama penyusunan penelitian ini. Terkhusus kepada Lembaga penyedia data dan semua yang berperan dalam kelancaran proses penelitian ini.

7. Referensi

- Auliya, N. W., & Hidajat, S. (2024). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2549–2558. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12092>.
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>.
- Devi, A. S., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(6), 356–363.
- Edison, E., Susilawati, E., & Bansa, Y. A. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 84. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.303>.
- Hady, S., & Cahaya, S. (2019). Analisis desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. *Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 104–117.
- Hidayat, T., Maulina, D., & Puspita, A. (2024). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan terhadap belanja modal Jawa Barat. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 105–115. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818>.
- Lubis, F. A., & Ritonga, S. (2021). Pengaruh dana perimbangan dan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9517–9524.

RESEARCH ARTICLE

- Mulyani, S., & Fitra, H. (2023). Pengaruh rasio derajat disentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah pengaruh tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 135–144. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.11>.
- Nazila, N., Oktarida, A., & Zainal, K. (2021). Pembiayaan SiLPA terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, 229–239.
- Pinem, I., Mardha, F., & Malau, Y. N. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 3(2), 201–218.
- Sartika, N., Kirmizi, K., & Indrawati, N. (2017). Analisis faktor-faktor dalam struktur APBD dan kinerja keuangan daerah yang mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. *Sorot*, 12(2), 121. <https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4902>.
- Zais, G. M. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 140-147.